

## TINGKAT KEMISKINAN DI WILAYAH KOTA MEDAN SERTA SOLUSI PEMERINTAH DALAM MENANGANINYA

**Hanifah Ramadhani**

Program Studi Ekonomi Islam FEBI UIN  
Sumatera Utara

*e-mail:* [hanifahramadhani33@gmail.com](mailto:hanifahramadhani33@gmail.com)

**Nur Afria Nanda Safitri**

Program Studi Ekonomi Islam FEBI UIN  
Sumatera Utara

**Wanhar Nasution**

Program Studi Ekonomi Islam FEBI UIN  
Sumatera Utara

**Juliana Nasution**

Program Studi Ekonomi Islam FEBI UIN Sumatera Utara

***Abstract.** This study intends to find out the level of poverty in the Medan city area and how the government's efforts/solutions deal with it. The research method used is a qualitative approach which is a literature study. This study also uses secondary data, namely the results of the percentage of the population below the poverty line from the Central Statistics Agency (BPS). Seen in 2017 the number of people below the poverty line in the city of Medan amounted to 204 thousand people, which is a fairly high number, In 2018, the number of poor people fell by 18,000, and in 2019 alone the number of people below the poverty line fell in the city of Medan around 183 thousand people but in 2020 the poverty rate in the city of Medan is still around 183,000 people, but in 2021 the poverty rate in the city of Medan will increase dramatically to around 193,000 people.*

***Key words:** Poverty, Solution, government*

**Abstrak.** Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tingkat kemiskinan di wilayah kota medan serta bagaimana upaya/solusi pemerintah dalam menanganinya. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka. Penelitian ini pun menggunakan data sekunder yaitu hasil persentase penduduk dibawah garis kemiskinan yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dilihat tahun 2017 jumlah masyarakat di bawah garis kemiskinan dikota medan berjumlah 204 ribu jiwa, merupakan angka cukup tinggi, Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin turun 18.000, dan pada tahun 2019 saja jumlah masyarakat dibawah garis kemiskinan turun dikota medan sekitar 183 ribu jiwa namun pada

tahun 2020 angka kemiskinan di kota Medan masih sekitar 183.000 orang, namun pada tahun 2021 angka kemiskinan di kota Medan akan meningkat drastis menjadi sekitar 193.000 orang.

**Kata kunci:** Kemiskinan, Solusi, Pemerintah

## **LATAR BELAKANG**

Memasuki dekade kedelapan kemerdekaan, salah satu masalah utama di Indonesia yaitu penduduk miskin. Istilah kemiskinan timbul disaat seseorang ataupun segelintir orang tak bisa memenuhi taraf kesejahteraan ekonomi yang menjadi kebutuhan minimum dari standar kehidupan tertentu seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, pakaian, serta pekerjaan. Ketika sumber daya keuangan dan material tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fundamental seseorang, seseorang dikatakan berada dalam keadaan miskin. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), orang dianggap miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan. Karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan bertambahnya jumlah keluarga miskin, keadaan kemiskinan terus memburuk. (Todaro dalam Nisa, 2020:57).

Dalam konteks Indonesia, penduduk miskin merupakan tanggung jawab negara yang dinyatakan oleh konstitusi negara secara eksplisit melalui undang-undang dasar 1945 pasal 34. Begitu juga dengan Alqur'an yang merupakan kitab suci yang didominasi penduduk di Indonesia sudah memberi petunjuk bagaimana cara menanggulangi kemiskinan. Bukannya tingkat kemiskinan menjadi semakin menurun, tingkat kemiskinan malah semakin meningkat. Peranan pemerintah kembali dipertanyakan, bertentangan ayat-ayat normatif Alqur'an dengan realita dalam kehidupan sehari-hari juga tak bisa dihindari.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKNM) dijumlahkan untuk menentukan garis kemiskinan. Orang yang hidup dalam kondisi sedikit di atas garis kemiskinan dikatakan hampir miskin. Penduduk miskin didefinisikan sebagai yang memiliki pendapatan atau pengeluaran per kapita rata-rata per bulan di bawah garis kemiskinan. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), penduduk hampir miskin merupakan demografi yang rentan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kemiskinan di wilayah kota medan serta bagaimana upaya/solusi pemerintah dalam menangani hal tersebut.

## KAJIAN TEORITIS

### a. Konsep Kemiskinan

Secara literal, kemiskinan berdasar dari istilah miskin yang berarti tidak berharta-benda. Kemiskinan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki persamaan arti dengan istilah kefakiran. Biasanya dari dua istilah ini disebutkan dengan bersamaan yaitu fakir miskin yang artinya orang yang sangat tidak mampu.

Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK) yang berkolaborasi dengan Lembaga Penelitian SMERU mendefinisikan kemiskinan, diantaranya yaitu:

- a) Pada dasarnya kemiskinan di definisikan dari segi pendekatan pada bentuk uang yang ditambah dengan keuntungan nonmaterial di diperoleh seseorang. Kemiskinan secara luas berupa kekurangan ataupun kondisi kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi, serta tidak memiliki pendidikan yang dibutuhkan oleh penduduk.
- b) Kemiskinan adakalanya di definisikan dari segi kekurangan ataupun tidak memiliki aset-aset, yang berupa rumah, uang, tanah, peralatan, emas, kredit dan sebagainya.
- c) Kemiskinan nonmaterial berupa kebebasan, hak guna mendapatkan pekerjaan yang memadai, hak atas rumah tangga serta kehidupan yang memadai.

Orang-orang Arab, yang terjebak dalam jurang antara si kaya dan si miskin, menjadikan tugas revolusioner mereka untuk menjelaskan kemiskinan dalam Al-Qur'an berabad-abad yang lalu. Orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan hanya dimanfaatkan sebagai orang buangan dan pantas diperlakukan seperti “budak” karena kemiskinan dipandang sebagai malapetaka. Beberapa dari mereka takut bangkrut dan rela menguburkan anak-anak mereka. Al-Qur'an sering merujuk pada fakir dan miskin ketika membahas gagasan kemiskinan.

Menurut Qardhawi dalam Nurul Huda, Islam melihat kemiskinan berupa suatu hal yang bisa membahayakan ahlak, cara berpikir, keluarga, serta rakyat. Islam percaya bahwa kemiskinan adalah tragedi atau musibah yang membutuhkan perlindungan Allah SWT karena kejahatan tersembunyi yang dikandungnya. Kemiskinan yang semakin meluas dapat

menyebabkan seseorang kehilangan pandangan akan Allah SWT dan rasa tanggung jawabnya terhadap sesama.

### **b. Bentuk/Jenis Kemiskinan**

Menurut Zakaria pada bukunya (2018: 26) kemiskinan bisa dibedakan menjadi tiga:

- 1) Kemiskinan relatif atau orang yang berada di golongan miskin relatif sebetulnya sudah hidup di atas garis kemiskinan akan tetapi ada dibawah kemampuan pada penduduk sekitarnya.
- 2) Kemiskinan cultural secara langsung terkait dengan tindakan individu atau kelompok individu yang menolak untuk berusaha meningkatkan taraf hidup mereka, meskipun ada upaya dari orang lain untuk melakukannya.
- 3) Kemiskinan absolute ialah sejumlah masyarakat yang tidak memiliki kemampuan memperoleh sumber daya guna mencukupi kebutuhan dasar.

Mereka berada dalam kemiskinan absolut, yang didefinisikan sebagai hidup di bawah garis kemiskinan internasional atau tingkat pendapatan minimum. Kemiskinan absolut ialah bentuk kemiskinan yang sangat parah, dan ditentukan oleh seberapa sejahtera sebuah keluarga dalam memenuhi kebutuhan paling dasar untuk bertahan hidup.

### **c. Faktor Penyebab Kemiskinan**

Menurut Kuncoro dalam Agustina (2018: 269) terdapat 3 faktor penyebab kemiskinan yaitu:

- 1) Secara makro, kemiskinan timbul sebab terdapat perbedaan pola kepemilikan sumber daya yang menyebabkan adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan, masyarakat miskin hanya mempunyai sumber daya dalam jumlah yang sedikit serta mutunya di bawah rata-rata.
- 2) Kemiskinan timbul sebab adanya ketidaksamaan mutu sumber daya manusia (SDM) yang rendah dan mengakibatkan produktivitasnya pun kecil, serta upahnya juga sedikit.
- 3) Kemiskinan timbul akibat ketidaksamaan akses serta modal. Karena pembatasan dan kurangnya akses manusia, mereka memiliki sedikit (jika ada) pilihan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka selain dari apa yang saat ini harus mereka lakukan (bukan apa yang harus dilakukan). Maka dari itu, dalam menentukan pilihan manusia memiliki keterbatasan yang berakibat terhambatnya kemampuan manusia untuk

mengubah tingkat hidupnya. Kemiskinan juga timbul akibat adanya ketidaksamaan mutu sumber daya manusia, sebab akan berpengaruh ke yang lain apabila mutu manusianya rendah, seperti pendapatan. Akan tetapi itu hanyalah masalah klasik. Saat ini pemicu kemiskinan dikarenakan tidak memiliki pendapatan yang cukup. Berbeda dengan sebagian Orang yang memiliki pendapatan yang bisa dikatakan cukup, dikarenakan hal tersebut kebanyakan dari mereka berpeluang besar mengembangkan jenjang karirnya sebab mereka bisa melangsungkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Beda halnya dengan sebagian orang yang berada dibawah garis kemiskin yang tak memiliki penghasilan yang cukup,hal ini mengakibatkan mereka tidak dapat melangsungkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan kebanyakan dari tidak m sebagian orang tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar uang untu biaya pendidikan di jenjang SMA maupun jenjang perguruan tinggi.

#### **d. Kategori dibawah garis Kemiskinan**

Bappenas dalam (Amir Machmud, 2016:286) mengutarakan kategori/indikator kemiskinan yang berupa:

- 1) Sedikitnya pangan, pakaian, serta papan (rumah) kurang memadai
- 2) Hak milik tanah serta alat produktif yang terbatas
- 3) Rendahnya kemahiran membaca serta menulis
- 4) Minimnya agunan serta kemakmuran hidup
- 5) Kerentanan serta keterpurukan pada bidang ekonomi serta sosial
- 6) Ketidakmampuan ataupun daya tawar yang rendah
- 7) Terbatasnya akses ke ilmu pengetahuan.

Menurut Badan Pusat Statistik (2008) indikator kemiskinan yaitu:

- 1) Tidak lebih dari 8m<sup>2</sup> per orang pada luas lantai bangunan rumah.
- 2) Terbuat dari kayu murahan/bambu/tanah pada jenis lantai rumah.
- 3) Berbahan dasar bambu/kayu/rumbia dinding tanpa diplester/ bermutu rendah pada jenis dinding tempat tinggal.

- 4) Minimnya fasilitas buang air besar/bersamaan dengan rumah tangga lain.
- 5) Minimnya penerangan untuk pencahayaan rumah tangga.
- 6) Kebutuhan air bersih bersumber dari air hujan/telaga/sungai/
- 7) Untuk memasak bahan bakar yang dipergunakan sehari-hari yaitu minyak tanah/arang/kayu bakar.
- 8) Hanya dalam satu kali seminggu mengkonsumsi susu/ayam/daging.
- 9) Dalam setahun hanya dapat membeli dan memiliki satu stel pakaian baru.
- 10) Setiap hari hanya dapat mengkonsumsi makan sebanyak satu/dua kali.
- 11) Tidak mampu dalam menebus uang pengobatan di balai kesehatan
- 12) Sumber pendapatan kepala rumah tangga ialah: menggunakan luas lahan 500m<sup>2</sup> untuk petani, serta nelayan, buruh tani, buruh perkebunan, buruh bangunan, ataupun pekerjaan lainnya dengan penghasilan tidak lebih dari Rp. 600.000,- perbulannya.
- 13) Jenjang pendidikan kepala rumah tangga: tidak bersekolah/tidak menyelesaikan sekolah dasar (SD)/tamat sekolah dasar (SD).
- 14) Belum mempunyai benda-benda yang praktis dijual/tabungan dengan nominal Rp. 500.000,- berupa ternak, emas, kendaraan kredit/non kredit, kapal, ataupun benda pendukung lainnya.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini memiliki ciri pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang mengembangkan literatur-literatur serta buku-buku sebagai landasan utama (Hadi, 1995: 3). Di dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan dikarenakan adanya alasan yang mendasarinya bahwasanya asal data tidak hanya di peroleh dari lapangan. Ada masanya sumber data didapatkan dari perpustakaan ataupun dokumen lainnya dalam bentuk tulisan, seperti buku, jurnal serta literatur lainnya (Mestika

Zed, 2008: 3). Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu hasil persentase penduduk dibawah garis kemiskinan yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Dalam ukuran tingkat kemiskinan yang terdapat dikota Medan kita bisa lihat dari data BPS, Data BPS menggunakan konsep kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan selalu dilihat dalam kaitannya dengan ketidakmampuan suatu perekonomian untuk memenuhi kebutuhan utama seperti pangan, tetapi bukan pangan yang di lihat dari pengeluaran. Anda dapat melihat bahwa masyarakat atau masyarakat di bawah garis kemiskinan adalah mereka yang rata-rata biaya hidup per bulannya berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan.

<b>Data Penduduk Miskin Di Kota Medan ( Ribu Jiwa)</b>					
Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah	204.00	186.45	183.79	183.54	193.03

*Sumber: data BPS kota Medan*

Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin kota medan belum menurun dan tidak stabil. Dilihat tahun 2017 jumlah masyarakat di bawah garis kemiskinan dikota medan berjumlah 204 ribu jiwa, merupakan angka cukup tinggi, Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin turun 18.000, dan pada tahun 2019 saja jumlah masyarakat dibawah garis kemiskinan turun dikota medan sekitar 183 ribu jiwa namun pada tahun 2020 angka kemiskinan di kota Medan masih sekitar 183.000 orang, namun pada tahun 2021 angka kemiskinan di kota Medan akan meningkat drastis menjadi sekitar 193.000 orang.

Dari data di atas terlihat bahwa Kota Medan masih belum mampu menurunkan angka kemiskinan. Sebagai kota besar, Kota Medan sendiri seharusnya mampu mengatasi masalah kemiskinan dengan baik atau sebaik mungkin, namun pada kenyataannya masalah kemiskinan masih cukup serius, dengan 193.000 penduduk miskin bermukim di Kota Medan pada tahun 2021. merupakan angka yang sangat tinggi. Kemiskinan perkotaan menimbulkan masalah sosial seperti kejahatan kerah putih, pembobolan, dan kejahatan seperti pencurian. Salah satu penyebab angka kemiskinan di kota Medan adalah pembangunan insfrastruktur yang tidak merata antara pusat kota dan wilayah Medan Utara sebagaimana kita ketahui jumlah penduduk miskin di wilayah kota Medan Utara seperti Medan Deli. dengan Rabhan Marelan karena pada

wilayah ini terkesan masih diabaikan serta di biarkan oleh Pemko Medan, Infrastruktur di wilayah tersebut juga masih buruk masih sering terjadi banjir. Dan Faktor yang terpenting yaitu pemerintah medan membutuhkan pemimpin yang benar-benar peduli dalam menanggulangi kemiskinan serta pembangunan infrastruktur yang merata di berbagai sektor dan wilayah, Apalagi pada saat pandemi COVID-19 angka kemiskinan naik beriringan dengan minimnya pendapatan masyarakat yang menimbulkan banyaknya tingkat pengangguran. Untuk memerangi kemiskinan, pemerintah pusat menawarkan berbagai program bantuan sosial. Agar bantuan ini bisa sampai kepada mereka yang membutuhkan, Pemkot Medan harus bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat. Kota Medan sendiri membutuhkan pemimpin yang bisa menjaga masyarakat, khususnya dalam hal kesejahteraan warganya. Mengembangkan usaha kecil dan menengah adalah salah satu cara untuk memerangi kemiskinan.

Integrasi strategi dan inisiatif pembangunan di berbagai sektor diperlukan untuk memerangi kemiskinan. Ada dua jenis program untuk memberantas kemiskinan: kebijakan langsung dan tidak langsung. Kebijakan tidak langsung membantu mengurangi kemiskinan dengan memperbaiki situasi ekonomi secara keseluruhan dalam masyarakat, sementara kebijakan langsung memberikan bantuan keuangan langsung kepada individu atau keluarga berpenghasilan rendah. Kebijakan tidak langsung meliputi (1) upaya meningkatkan stabilitas ekonomi, sosial dan politik, dan (2) pengelolaan penduduk. (3) meningkatkan keamanan lingkungan melalui pelatihan serta penyiapan kelompok masyarakat dibawah garis kemiskinan; Kebijakan langsung termasuk mengembangkan lebih luas basis data dasar untuk menargetkan populasi tertentu yang ingin kami bantu, menyediakan kebutuhan pokok, dan perawatan kesehatan, menciptakan lapangan kerja, serta menyediakan layanan kredit.

Cara terbaik untuk memerangi kemiskinan adalah dengan mempromosikan kebijakan yang memperkuat pesan dan posisi ekonomi dalam perekonomian. Hal ini akan menyebabkan perubahan struktural dalam perekonomian, seperti redistribusi sumber daya, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan peluang untuk pembangunan sumberdaya manusia. program yang digunakan dapat memperkuat serta mendukung masyarakat melalui peningkatan perekonomian nasional. Agar efektif, kebijakan tersebut meski dilaksanakan secara bertahap, dengan fokus pada perluasan akses ke sumber daya pembangunan dan penciptaan peluang usaha bagi masyarakat dibawah garis kemiskinan agar dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Ini membantu mereka meminimalisir kemiskinan. Terlebih dari itu, upaya



meminimalisir garis kemiskinan harus selalu didasarkan pada definisi dibawah garis kemiskinan dan pemahaman yang jelas.

Terdapat tiga cara untuk memberdayakan masyarakat dibawah garis kemiskinan. Salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat adalah dengan fokus pada kebutuhan masyarakat miskin. Kedua, bekerja sebagai tim untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi akan menjadi yang paling efektif. Ketiga, pendekatan pendampingan melibatkan penggunaan asisten profesional yang membantu memfasilitasi, mengomunikasikan, dan memberi energi pada kelompok orang miskin saat mereka bekerja untuk mencapai kemandirian.

Peran pemerintah sebagaimana diuraikan di atas adalah dengan menerbitkan program pengentasan kemiskinan. Program tersebut bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 14 No. 5 Tahun 2015 yaitu:

1. Bantuan pangan

Pemerintah daerah telah memberikan bantuan pangan sebagai berikut:

- a. BANSOS (Bantuan Sosial)

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, bantuan sosial merupakan salah satu bentuk dukungan finansial atau material nonselektif yang tidak berkelanjutan.

- b. BLT (Bantuan Langsung Tunai)

Program bantuan tunai adalah program bantuan tunai pemerintah yang membantu orang miskin dengan memberi mereka uang.

- c. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)

Setiap bulannya, keluarga penerima manfaat menerima bantuan sembako nontunai atau disebut juga dengan bantuan sembako dari pemerintah melalui mekanisme akun elektronik yang hanya digunakan untuk pembelian sembako di kelompok usaha elektronik Warung Gotong Royang yang dikenal dengan KUBE PKH. Bank (BTN, BNI, BRI, dan Bank Mandiri) dapat mengambil tindakan hukum terhadap penjual makanan yang mengancamnya.

2. Bantuan kesehatan

Bantuan kesehatan diberikan dalam bentuk PKH Kesehatan. Program PKH berfokus pada pengurangan gizi buruk pada bayi dan ibu hamil serta peningkatan kesehatan mereka.

3. Bantuan pendidikan

PKH memberikan bantuan kepada siswa dalam upaya pendidikan mereka. Sektor pendidikan PKH memberikan akses layanan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak.

4. Bantuan perumahan

Permukiman kumuh karena masih banyak masyarakat yang tinggal di rel kereta api dan di tepi bantaran sungai. Akibat dari keadaan tersebut, Dinas Perumahan membantu masyarakat miskin yang masih belum mampu untuk tinggal di rumahnya sendiri dengan merenovasi rumahnya.

5. Bantuan peningkatan keterampilan

Program pembelajaran yang disebut peningkatan keterampilan/kemampuan disiapkan untuk memberi orang kesempatan belajar untuk memajukan pemikiran, pengetahuan, dan keterampilan mereka.

6. Bantuan modal usaha

Pemerintah menawarkan bantuan keuangan kepada komunitas Nelayan Indah. Masyarakat ini tergolong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan dengan bantuan UMKM diberikan hibah tunai sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pemerintah mendukung nelayan Indah yang menerima uang tunai sebagai usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) dengan dukungan dari UMKM. Rp2.400.000 (2 juta 400 ribu rupiah), biaya ini untuk pengembangan usaha.

7. Bantuan perlindungan rasa aman.

Pemerintah membentuk Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), untuk melindungi masyarakat.

Jika ini dilakukan secara optimal, jumlah penduduk miskin di Kota Medan pasti akan berkurang dari tahun ke tahun. Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan bersama menurut prinsip-prinsip nasihat dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan, bahwa kepentingan bersama didahulukan dari kepentingan pribadi. Dalam hal ini, mereka yang dermawan

menyumbangkan perbekalan harus mendistribusikannya kepada mereka yang membutuhkan melalui infaq. Masyarakat dengan keterbatasan pangan sebaiknya memanfaatkan Rizqi ini untuk memenuhi kebutuhannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah kota Medan masih belum bisa menurunkan angka kemiskinan. Seharusnya Sebagai kota besar, Kota Medan sendiri telah mampu mengatasi masalah kemiskinan secara cukup atau maksimal, namun pada kenyataannya masalah kemiskinan masih cukup serius. Mengatasi kemiskinan memerlukan upaya untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program pembangunan di berbagai sektor. Cara terbaik untuk memerangi kemiskinan adalah dengan mempromosikan kebijakan yang memperkuat pesan dan posisi ekonomi dalam perekonomian. Bahkan faktor pendorong angka kemiskinan di Kota Medan adalah pembangunan yang tidak merata dan belum cukupnya pemimpin untuk mengatur kemiskinan di Kota Medan.

Dalam penelitian ini penulis memberi saran untuk pemerintah Kota Medan untuk terus memuat program dalam memnanggulangi kemiskinan serta lebih melihat daerah-daerah dikota medan yang masih tertinggal misalnya dipemukima perbatasan sungai. Dan untuk masyarakat Kota Medan lebih menyeleksi dalam memilih pemimpi yang akan menjabat kedepannya. Untuk penelitian selanjutnya penulis berharap agar dapat meneliti tingkat kemiskinan didaerah yang lain untuk melihat apa saja faktor penyebab kemiskinan dan bagaimana cara menanggulangnya.

## DAFTAR REFERENSI

- Ali, Lukman., dkk. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cetakan ketujuh. Jakarta: Balai Pustaka.
- E. Jacobus, P. Kindangen, E. Walewangko. (2021) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 86-103.
- Hadi, S. (1995). *Metodologi Research Jilid 3*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Huda, N. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana.

- Ilmi, S. (2017). Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam. *Al-Masalahah*, 13(1), 67-84.
- Itang. (2015). Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan. *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 16(1), 1-30.
- Kudus, A., dkk. (2018). Verifikasi Data Kemiskinan Secara Swadaya: Studi Kasus Desa Karangwangi, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jawa Barat. *Jurnal Statistika*, 18(1), 51-56.
- Nisa, K., dkk. (2020). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2018. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial SOROT*, 15(1), 55-63.
- OK. Henry., dkk. (2022). KAJIAN FAKTOR NATURAL DAN KULTURAL TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN (MEDAN UTARA). *Jurnal Potensi*, 2(2), 32-43
- Pemerintah Kota Medan, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015
- Rustanto, B. (2015). *Menangani Kemiskinan*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Simanjuntak, D. (2019). "Rizqy Dalam Al-Qur'an", *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 5(1), 221.
- Siregar, F.A. (2018). Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 4(2), 1-14.
- Zakaria, J. (2018). *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar. Sulawesi Selatan.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.